

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan keuangan pemerintah merupakan suatu bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik dengan menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi suatu entitas dalam mendanai aktivitasnya. Adapun beberapa karakteristik kualitatif pelaporan keuangan yang harus digunakan pemerintah sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam penyediaan informasi akuntansi yang dapat memenuhi tujuan instansi pemerintah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah telah diatur di dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah, adapun upaya pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah baik dari pusat maupun pemerintah daerah yaitu dengan menyampaikan atau menyediakan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam undang-undang mengenai pelaporan keuangan pemerintah meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).

Di dalam konteks pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengelolaan keuangan daerah telah mengamanatkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat (Pradono & Basukianto, 2015) Kualitas informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah khususnya pada pemerintah daerah belum dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas

informasi laporan keuangan disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdiri dari: (1) relevan (2) andal (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami (PP No.71 Tahun 2010). Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas suatu laporan keuangan adalah apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan standar, adanya tindak lanjut terkait temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan komitmen untuk terus memantau pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan adanya tindak lanjut terhadap pemeriksaan keuangan oleh BPK mengenai beberapa koreksi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar sesuai dengan SAP (Sari, 2012).

Menurut hasil BPK tahun (2015) laporan keuangan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu sebesar (47%) dari 539 LKPD. Berdasarkan perkembangan opini BPK terhadap LKPD dari tahun sebelumnya ternyata sudah mengalami peningkatan namun masih belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini karena masih ada opini *disclaimer* sebesar (6%). BPK masih menemukan sejumlah permasalahan yang terkait dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan dan hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, sehingga kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah masih dipertanyakan (Ihps, 2015).

Menurut BPK permasalahan yang ditemukan dalam LKPD tahun anggaran 2014 hampir terjadi diseluruh pemerintah daerah yaitu tentang penatausahaan aset tetap yang belum tertib diantaranya tanah pemda yang belum bersertifikat dan tidak dapat ditelusuri keberadaannya dan tidak terdapat bukti atau dokumen yang sah untuk penggunaan belanja daerah yang tidak sesuai dengan pengeluaran riil dan penyimpangan administrasi meskipun opini yang diperoleh beberapa pemerintah daerah adalah opini WTP, namun masih terdapat beberapa daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebesar (46%), Tidak Wajar (TW) sebesar (1%), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP) sebesar (6%) (Ihps, 2015).

Laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan hasil opini WTP yang diberikan oleh BPK apabila dilihat dari SPI dari beberapa LKPD menunjukkan adanya kelemahan SPI sebesar (50%) yang terdiri atas permasalahan

sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian internal. Menurut pendapat BPK permasalahan lain juga terdapat pada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 19,19 miliar berdampak finansial. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah pada pemerintah daerah yang belum sesuai ternyata masih terdapat LKPD yang mengalami penurunan sebesar (4,16%). Hal tersebut disebabkan karena beberapa LKPD masih memiliki kelemahan dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP. Selain implementasi SAP, Teknologi Informasi (TI) pada pemerintah daerah menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban pengembangan aplikasi dan peningkatan infrastruktur TI belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengembangan aplikasi dan peningkatan infrastruktur TI (Ihps, 2015).

Implementasi terhadap SAP sangat diperlukan agar laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah dapat diperbandingkan, dan dengan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara penyaji laporan keuangan, pengguna laporan keuangan maupun pengawas laporan keuangan (Sari, 2012). Terdapat sejumlah penelitian terkait dengan pengaruh implementasi SAP terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah seperti penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012), Sousa *et al* (2013), Mahaputra & Putra (2014), Ningtyas (2015) dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian Inapty & Martiningsih (2016) yang menyatakan bahwa penerapan SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain implementasi terhadap SAP, pemanfaatan TI juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga mampu meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik (PP No.56 Tahun 2005). Terdapat sejumlah

penelitian terkait dengan pengaruh pemanfaatan TI terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Kurniawan 2016, Pradono & Basukianto 2015, Razaei 2013). Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian Surastiani & Handayani (2015) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah SPI. SPI ini merupakan suatu tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan suatu keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Sari, 2012). Terdapat sejumlah penelitian terkait dengan pengaruh SPI terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dimana hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Sari 2012, Pradono & Basukianto 2015, Surastiani & Handayani 2015, Mahaputra & Putra 2014). Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian Budiawan & Purnomo (2014), Kurniawan (2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dan menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang baik belum tentu mampu meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian tentang kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Sari (2012) yang membedakan dengan penelitian ini adalah kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dijelaskan lebih lanjut pada penyelesaian temuan audit dan implikasinya terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan latarbelakang tersebut dan adanya inkonsistensi penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali

mengenai pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

I.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pemerintah daerah telah mengimplementasikan SAP, memanfaatkan TI dan adanya SPI yang baik guna meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
- b. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
- c. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji hubungan antara Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Untuk menguji hubungan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Untuk menguji hubungan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, dimana dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan terkait indikator yang digunakan dalam mengukur kualitas informasi laporan keuangan seperti penelitian Widyaningsih, dkk (2011), Sari (2012), dengan penelitian Surastiani & Handayani (2015). Selanjutnya, dalam penelitian ini sebagai bentuk pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel Implementasi SAP sebagai variabel independen. Serta diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh khususnya mengenai pengaruh Implementasi SAP, Pemanfaatan TI dan SPI terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Manfaat Praktis

1) Manfaat Umum

Mampu memberikan *input* dalam implementasi SAP berhubungan dengan PP No.71 Tahun 2010 dan mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaporan keuangan. Dan mampu memberikan informasi mengenai variabel yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

2) Pemerintah daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dijadikan masukan untuk mengoptimalkan pengawasan internal dalam rangka menciptakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

3) Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan referensi dan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.